

## DAFTAR BACAAN

### Daftar Buku

- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2014.
- Atmadja, Arifin P. Soeria, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik, dan Praktik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Ilmar, Aminuddin, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Prasetya, Rudhi, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sillalahi, Jur Udin, *Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara, Aset Negara, dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan*, P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika, Jakarta, 2013.
- Subekti, *Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, terjemahan, Pradya Paramita, Bandung, 2008.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Suparmoko, *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta, 2013.
- Syamsi, Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Bina Aksara, Yogyakarta, 1994.
- Syahrul, Muhammad Afni Nazar, Ardiyas, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Citra Harta Prima, Jakarta.
- Tjandra, W. Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta, 2014.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembar Negara 3477).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara 4286).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembar Negara 4297).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara 4355).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara 4400).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Nomor 4756).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara 4488).

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara 4609).

Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Kekayaan BUMN Dari Kekayaan Negara.

**Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Piutang Negara, 25 September 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 Perihal Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 18 September 2014.

**Website**

[www.ermanhukum.com/dokumen/Keuangan%20BUMN%20bukan%20Keuangan%20Negara.pdf](http://www.ermanhukum.com/dokumen/Keuangan%20BUMN%20bukan%20Keuangan%20Negara.pdf), Erman Rajagukguk, “Walaupun Keuangan BUMN bukan Kengan Negara; KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian tetap berwenang Memeriksa Korupsi di BUMN.

